

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul)

Ratnaningsih

Abstract

Characteristic quality of information local government financial report should be fulfilled with reliability value and timeliness according to Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Reliability value and timeliness can be achieved with capacity of support human resources sufficiency and good internal control system. The purpose of this research is to test the influence of human resource capacity and the internal control system on the quality of local government financial report information.

Questioner were distributed to 150 respondents from 30 SKPD. The respondents of this research are the employees of accounting and finance department in Bantul Regency.

The results of the study show that human resource capacity have no significant effects on reliability value and timeliness of local government financial report and internal control system have positive effects on reliability value and timeliness of local government financial report.

Keywords: *quality of information financial report, human resource capacity, internal control system*

Abstrak

Karakteristik kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi nilai keterandalan dan ketepatanwaktuan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Keterandalan dan ketepatanwaktuan dapat tercapai dengan dukungan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dan sistem pengendalian intern yang baik. Tujuan penelitian ini menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kuisisioner dibagikan kepada 150 responden pada 30 SKPD. Responden penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi dan keuangan di Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kualitas informasi laporan keuangan, kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern.

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP) Berbasis Akrual. Pemerintah Daerah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan keuangan pemerintah. LKPD disajikan dengan relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami sesuai SAP dengan tujuan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas dan transparansi dapat terwujud apabila penyajian LKPD sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah (Yendrawati, 2013).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan publik (Mardiasmo, 2006). Kriteria informasi laporan keuangan pemerintah daerah harus mengandung nilai keterandalan dan ketepatanwaktuan. Hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan masih ada ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam penyajian LKPD karena kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah belum memadai (Indriasari dan Ertambang, 2008).

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dapat dilihat dari kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan masing-masing. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM. Sumber daya manusia yang berkompeten diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai SAP yang telah ditetapkan pemerintah (Sukmaningrum dan Puji, 2012).

Perubahan peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdampak pada teknis operasional pelaporan keuangan daerah. Teknis operasional pelaporan keuangan daerah meliputi sistem akuntansi, prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, laporan serta pengawasan. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai dengan latarbelakang pendidikan akuntansi menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas akan menghasilkan keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Sari dan Banu, 2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keterandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan informasi diselenggarakan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (Yendrawati, 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu Indriasari dan Ertambang (2008); Sukmaningrum dan Puji (2012); Yendrawati (2013) dan; Sari dan Banu (2014) yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan namun berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Sukmaningrum dan Puji (2012) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Yendrawati (2013) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian Sari dan Banu (2014) menunjukkan sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Hasil penelitian yang berbeda-beda membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi dinilai dari keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual yang dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

B. Penelitian terdahulu

Penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Data diperoleh dari kuisisioner dan wawancara kepada bagian akuntansi pada SKPD di Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 73 kuisisioner. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan namun berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Sukmaningrum dan Puji (2012) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang. Data diperoleh dari 150 kuisisioner yang disebar pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Semarang dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Yendrawati (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dari 44 kuisisioner yang disebar kepada pengelola keuangan Dinas Sosial DIY. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian Sari dan Banu (2014) tentang keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah ditinjau dari sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Data diperoleh dari 166 kuisisioner yang disebar kepada

pegawai bidang akuntansi, anggaran dan aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di wilayah eks Karesidenan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia dan pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

Penelitian Surastiani dan Bestari (2015) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Salatiga. Data diperoleh dari 74 sampel yang dibagikan pada pegawai bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Prasetyo (2015) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informai, pengendalian intern akuntansi dan good corporate governance terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah pada 32 Satuan Kerja Polda Jambi. Data diperoleh dari 80 reponden yang terdiri dari kepala urusan keuangan dan staf bagian keuangan Polda Jambi. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kerandalan pelaporan keuangan pemerintah. Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan namun berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

C. Penurunan Hipotesis

Menurut Surastiani dan Bestari (2015) pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman akuntansi yang cukup untuk menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah yang baik. Laporan keuangan pemerintah daerah dituntut mengandung nilai informasi yang andal. Keterandalan laporan keuangan daerah dapat dicapai jika sumber daya manusia memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Hasil penelitian Yendrawati (2013) serta Sari dan Banu (2014) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan daerah.

H₁: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Sukmaningrum dan Puji (2012) sistem pengendalian intern dilihat dari integritas data, ketepatan input, prosedur otorisasi, penyimpanan dokumen sumber data, pemberian wewenang penentuan kebijakan dan standar akuntansi serta pelaksanaan kebijakan. Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) membuktikan sistem pengendalian intern pemerintah daerah sudah baik. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Sari dan Banu (2014) sistem pengendalian intern menekankan tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak disengaja) dan penyimpangan (sengaja) dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi nilai keterandalan sehingga data yang disajikan benar dan valid. Hasil penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), Sukmaningrum dan Puji (2012) serta Surastiani dan Bestari (2015) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Indriasari dan Ertambang (2008) kapasitas sumber daya manusia dilihat dari kemampuan individu dalam pencapaian kinerja, pelaksanaan tugas dan jabatan serta pendidikan aparatur pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang mengandung nilai informasi harus memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan. Deskripsi pekerjaan yang jelas dan jumlah sumber daya manusia yang memadai dapat mengoptimalkan hasil pekerjaan pengelola keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Yendrawati (2013) serta Sari dan Banu (2014) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

H₃: Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Yendrawati (2013) efektifitas pengendalian intern dapat mencegah terjadinya kecurangan akuntansi sehingga kualitas informasi laporan keuangan dapat ditingkatkan. Semakin bagus kualitas pengendalian intern maka tingkat kecurangan

semakin rendah. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini disebabkan sistem pengendalian intern bagus tetapi belum diterapkan secara efektif maka penyajian informasi laporan keuangan tidak tepat waktu.

Menurut Sari dan Banu (2014) keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berarti laporan keuangan belum memenuhi kualitas informasi ketepatanwaktuan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan belum sepenuhnya ditaati dengan baik. Hasil penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), Sukmaningrum dan Puji (2012) serta Surastiani dan Bestari (2015) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

H₄: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

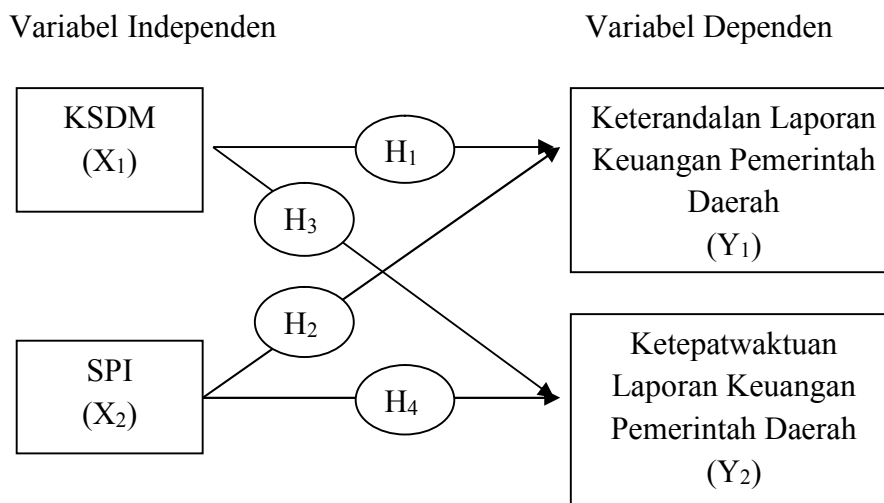
D. Definisi Operasi Variabel

Variabel dependen penelitian adalah kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas informasi dapat diukur dari keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik laporan keuangan daerah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua. Penggunaan SAP dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah agar terwujud akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71, 2010).

Variabel independen penelitian adalah kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Menurut Xu, et. al. (2003) indikator untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia yaitu pemahaman terhadap peraturan dan standar, interaksi dengan sistem, kontrol terhadap sumber daya manusia, serta pendidikan dan pelatihan. Sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang memenuhi nilai keterandalan dan ketepatanwaktuan sesuai peraturan pemerintah yang telah ditetapkan (Yendrawati, 2013).

Menurut Mahmudi (2007) sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan dapat diukur dengan sistem dan prosedur akuntansi, otorisasi pejabat yang berwenang, formulir, dokumen dan catatan setiap transaksi serta pemisahan tugas. Variabel diukur dengan model skala *Likert* lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Responden diminta untuk menyatakan pendapat terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan (Indriasari dan Ertambang, 2008).

E. Model Penelitian



Gambar 1. Hubungan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan.

F. Hasil Analisis Data

Tabel 1.
Distribusi Kuisioner

	Jumlah	Persentase
Kuisioner yang disebar	175	100,00%
Kuisioner yang kembali	165	94,29%
Kuisioner yang tidak kembali	10	5,71%
Kuisioner yang tidak bisa diolah	15	8,57%
Kuisioner yang dapat diolah	150	85,71%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Tabel 2.
Demografi Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Usia		
- <25	9	6,00%
- 26-35	27	18,00%
- 36-45	56	37,33%
- >45	58	38,67%
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	54	36,00%
- Perempuan	96	64,00%
Masa Kerja		
- <5 th	7	4,67%
- 6-15 th	55	36,67%
- 16-25 th	56	37,33%
- >25 th	32	21,33%
Pendidikan Terakhir		
- SMA/SMK/Sederajat	30	20,00%
- Diploma	19	12,67%
- S1	82	54,67%
- S2	19	12,67%
Latarbelakang Pendidikan		
- Akuntansi	21	14,00%
- Non Akuntansi	129	86,00%

Sumber: Data Primer diolah, 2016

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana item pertanyaan dalam kuisioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2011). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson Correlation*. Hasil penelitian menunjukkan semua item pertanyaan untuk mengukur kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan daerah adalah valid. Sebagai contoh tabel 3 merupakan hasil pengujian validitas untuk instrumen sistem pengendalian intern.

Uji reliabilitas item pertanyaan dengan melihat konsistensi koefisien *Cronbach's Alpha* untuk semua variabel. Variabel dikatakan reliabel jika nilai koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali 2011). Berdasarkan data table 4, maka dapat disimpulkan semua butir pertanyaan variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, keterandalan dan ketepatanwaktuan memiliki *Cronbach Alpha* di atas 0,70 maka dinyatakan reliabel.

Tabel 3.
Uji Validitas SPI

No	Korelasi	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X1	0,723**	0.000	Valid
X2	0,788**	0.000	Valid
X3	0,763**	0.000	Valid
X4	0,689**	0.000	Valid
X5	0,565**	0.000	Valid
X6	0,549**	0.000	Valid
X7	0,681**	0.000	Valid
X8	0,671**	0.000	Valid
X9	0,724**	0.000	Valid
X10	0,677**	0.000	Valid
X11	0,572**	0.000	Valid
X12	0,554**	0.000	Valid

** Signifikan pada $\alpha < 1\%$

Sumber : Data Primer diolah, 2016

Tabel 4.
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia	0,817	10	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0,879	12	Reliabel
Keterandalan	0,880	7	Reliabel
Ketepatanwaktuan	0,933	9	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, 2016

2. Uji Hipotesis Model 1

Tabel 5.
Hasil Uji R², Uji F dan Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.497	1.924		4.416	0.000**
KSDM	0.031	0.040	0.055	0.784	0.435
SPI	0.395	0.043	0.649	9.252	0.000**
<i>Adjusted R Square</i>					0.453
Std. Error of the Estimate					1.886
F hitung: 62.725					0.000**

a. ** Signifikan pada $\alpha < 1\%$

b. Dependen Variabel: Keterandalan

Sumber: Data Primer diolah, 2016

a) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah

pada tabel 5 menunjukahkan *Adjusted R Square* 0,453 artinya 45,3% keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern sisanya 54,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

b) Uji F

Pada tabel 5 Uji F menunjukkan hasil nilai F_{hitung} 62.725 dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan variabel kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan H_1 tingkat signifikansi diatas 5% berarti H_1 ditolak atau kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. H_2 menunjukkan tingkat signifikansi dibawah 5 % berarti H_2 diterima atau sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Uji Hipotesis Model 2

Tabel 6.
Hasil Uji R², Uji F dan Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.004	2.902		2.758	0.000**
KSDM	0.030	0.060	0.036	0.504	0.615
SPI	0.574	0.064	0.640	8.905	0.000**
<i>Adjusted R Square</i>					0.426
Std. Error of the Estimate					2.844
F hitung: 56.385					0.000**

a. ** Signifikan pada $\alpha < 1\%$

b. Dependen Variabel: Ketepatanwaktuan

Sumber: Data primer dioleh, 2016

a) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah

pada tabel 6 menunjukkan *Adjusted R Square* 0,426 artinya 42,6% ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern sisanya 57,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

b) Uji F

Pada tabel 6 Uji F menunjukkan hasil nilai F hitung 56.385 dengan signifikansi dibawah 5%, maka dapat disimpulkan variabel kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketepatan laporan keuangan.

c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t pada tabel 6 menunjukkan H_3 tingkat signifikansi diatas 5% berarti H_3 ditolak atau kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah. H_4 menunjukkan tingkat signifikansi dibawah 5% berarti H_4 diterima atau sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah.

G. PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi pada tabel 5 menunjukkan kapasitas sumber daya manusia memiliki t_{hitung} sebesar 0,784 dengan signifikansi 0,435. Nilai signifikansi 0,435 lebih dari α 0,05 sehingga hipotesis (H_1) ditolak. Hal ini disebabkan kapasitas sumber daya manusia di SKPD Kabupaten Bantul belum optimal. Data demografi responden menunjukkan bahwa pegawai di bidang akuntansi dan keuangan yang berlatarbelakang pendidikan akuntansi masih sedikit jumlahnya. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual mengharuskan pemerintah daerah menyusun laporan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten Bantul memberdayakan pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan yang handal hanya

dapat dilakukan oleh pegawai yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi yang memadai. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Indriasari dan Ertambang (2008) dan Prasetyo (2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian hipotesis 2 (H_2) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi pada tabel 5 menunjukkan sistem pengendalian intern memiliki t_{hitung} sebesar 9.252 dengan signifikansi 0.000**. Nilai signifikansi 0,000** lebih kecil dari α 0,05 sehingga hipotesis H_2 diterima. Sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah memenuhi fungsi efektifitas dan efisiensi operasi, keterandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di SKPD Kabupaten Bantul telah dilakukan sesuai dengan fungsi jabatan yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Indriasari dan Ertambang (2008), Sukmaningrum dan Puji (2012) serta Surastiani dan Bestari (2015) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terbukti tahun 2015 Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul sudah baik dan memadai. Hasil ini mendukung penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa sistem pengendalian intern bertujuan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien serta keandalan pelaporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis 3 (H_3) menunjukkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi pada tabel 6 menunjukkan kapasitas sumber daya manusia memiliki t_{hitung} sebesar 0,504 dengan signifikansi 0,615. Nilai signifikansi 0,615 lebih dari α 0,05 sehingga hipotesis (H_3) ditolak. Jumlah pegawai dengan latarbelakang pendidikan akuntansi yang sedikit membuat penyajian laporan

keuangan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu dapat tercapai bila kapasitas sumber daya manusia memenuhi jumlah dan kualifikasi pendidikan yang menunjang melakukan pekerjaan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai bidang akuntansi dan keuangan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sukmaningrum dan Puji (2012) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Yendrawati (2013), Sari dan Banu (2014) serta Surastiani dan Bestari (2015) yang menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari keterandalan dan ketepatan waktu.

Hasil pengujian hipotesis 4 (H_4) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi pada tabel 6 menunjukkan sistem pengendalian intern memiliki t_{hitung} sebesar 8.905 dengan signifikansi 0.000**. Nilai signifikansi 0,000** lebih kecil dari α 0,05 sehingga hipotesis H_4 diterima. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah menerapkan sistem pengendalian intern atas sistem dan prosedur akuntansi, otorisasi pejabat yang berwenang, formulir, dokumen dan catatan setiap transaksi serta pemisahan tugas yang jelas. Sistem pengendalian intern yang baik maka akan meningkatkan ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan wujud kepatuhan pemerintah terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Sari dan Banu (2014) yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah dan penerapan teori kepatuhan terhadap pelaporan keuangan daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Yendrawati (2013) yang menyatakan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

I. KETERBATASAN DAN SARAN

1. Ruang lingkup penelitian hanya pada 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel dan memperluas ruang lingkup penelitian.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti pemanfaatan teknologi informasi (Indriasari dan Ertambang, 2008) yang berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel dependen seperti dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuisioner sehingga dapat dilakukan pengembangan dengan metode kualitatif dalam penelitian selanjutnya.
5. Kurangnya pemahaman dan keseriusan responden dalam menjawab pertanyaan dalam kuisioner mengakibatkan hasil penelitian rentan terhadap bias jawaban responden sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS 19. Edisi kelima. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Naryanto. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SNA XI Pontianak*.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. *UPP STIM YKPN*. Yogyakarta.
- Prasetyo, Aditya Rachman. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Good Corporate Governance Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Jambi. Vol. 1, No. 1. Hal. 37-52*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Keuangan Negara. Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 127. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 123. *Sekretariat Negara*. Jakarta.
- Sari, Shinta Permata dan Banu Witono. 2014. Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Research Methods and Organizational Studies. ISBN: 978-602-70429-1-9. Hal. 418-425*.
- Sukmaningrum, Tantriani dan Puji Harto. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Surastiani, Dyah Puri dan Bestari Dwi Handayani. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 7, No. 2, ppl. 39-49*.
- Xu Honjiang, Lin Binshan dan Nord Daryl Jeretta. 2003 Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Study. *College of Business Administration. Central Michigan University. Vol. 103. Iss: 7, pp. 461-470*.
- Yendrawati, Reni. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Faktor

Eksternal sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*. Vol. 17, No. 2, pp, 166-174.